



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S2 Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Politik Hukum	7410802015	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=4.48	2	22 Februari 2025																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	CPL-8	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya																																																					
	CPL-18	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	mahasiswa mampu menganalisis materi Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan dan dikontekstualisasikan dalam kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat.																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30%;">CPMK</td> <td style="width: 30%;">CPL-8</td> <td style="width: 30%;">CPL-18</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	CPMK	CPL-8	CPL-18	CPMK-1	✓	✓																																															
CPMK	CPL-8	CPL-18																																																					
CPMK-1	✓	✓																																																					
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																				
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1																																																							
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan membahas tentang fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum dan tata kelola pemerintahan, pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum, sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan, hubungan politik dan hukum, sistem hukum dan politik, good governance, paradigma di bidang politik dan hukum, karakter produk hukum, teori campur tangan negara, perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan otonomi daerah.																																																						
Pustaka	Utama :																																																						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. 2. 2. Imam Syaekani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. 3. 3. Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum, Total Media: Yogyakarta. 4. 4. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 5. 5. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta. 																																																						
	Pendukung :																																																						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung. 2. 2. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung. 3. 3. Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta 																																																						
Dosen Pengampu	Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.																																																						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																

1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar politik hukum dan tata kelola pemerintahan	Dapat memahami dasar-dasar politik hukum dan tata kelola pemerintahan	Kriteria: Ketepatan memahami dasar-dasar politik hukum dan tata kelola pemerintahan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar politik hukum dan tata kelola pemerintahan 50		Materi: 1. Pengantar Pustaka: Materi: 2. Dasar-dasar politik hukum dan tata kelola pemerintahan Pustaka:	5%
2	Mahasiswa mampu menganalisis pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum	Dapat menganalisis pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum	Kriteria: Ketepatan menganalisis pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-2: Melakukan review materi 50		Materi: 1. Pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum Pustaka:	5%
3	Mahasiswa mampu memahami good governance serta mampu membedakan konsep governance dan government	Dapat memahami good governance serta mampu membedakan konsep governance dan government	Kriteria: Ketepatan memahami good governance serta mampu membedakan konsep governance dan government Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi		Materi: 1. Good Governance Pustaka: Materi: 2. Governance dan Government Pustaka:	5%
4	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan	Dapat menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan	Kriteria: Ketepatan menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: Menjelaskan menguraikan sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan		Materi: 1. Sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pemerintahan pasca kemerdekaan Pustaka:	5%
5	Mahasiswa mampu mengevaluasi sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru	Dapat mengevaluasi sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru	Kriteria: Ketepatan mengevaluasi sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: mengevaluasi sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru		Materi: 1. Sejarah perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan orde baru dan masa pemerintahan pasca orde baru Pustaka:	10%
6	Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan	Dapat menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan	Kriteria: Ketepatan menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait menganalisis keterkaitan antara negara hukum dan kekuasaan 50		Materi: 1. Negara hukum dan kekuasaan Pustaka:	5%
7	Mahasiswa mampu membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	Dapat mampu membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya	Kriteria: Ketepatan membedakan politik dan hukum serta hubungan antara keduanya Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi		Materi: 1. Politik dan hukum serta hubungan antara keduanya Pustaka:	10%

8	Ujian tengah semester	Ujian tengah semester	Kriteria: Ujian tengah semester Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif			Materi: Ujian Tengah Semester Pustaka: 2. <i>Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung.</i>	5%
9	Mahasiswa mampu menganalisis paradigma di bidang politik dan hukum	Dapat menganalisis paradigma di bidang politik dan hukum	Kriteria: Ketepatan menganalisis paradigma di bidang politik dan hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi		Materi: 1. Paradigma di bidang politik dan hukum Pustaka:	10%
10	Mahasiswa mampu mengevaluasi karakter produk hukum	Dapat mengevaluasi karakter produk hukum	Kriteria: Ketepatan mengevaluasi karakter produk hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ketepatan mengevaluasi karakter produk hukum *Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi tentang mengevaluasi karakter produk hukum 50		Materi: 1. Mengevaluasi karakter produk hukum Pustaka:	5%
11	Mahasiswa mampu menganalisis teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan	Dapat menganalisis teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan	Kriteria: Ketepatan menganalisis teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: Menganalisis teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan 50		Materi: 1. Teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan Pustaka:	5%
12	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi perbandingan politik hukum	Dapat menganalisis dan mengevaluasi perbandingan politik hukum	Kriteria: Ketepatan menganalisis dan mengevaluasi perbandingan politik hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi tentang menganalisis dan mengevaluasi perbandingan politik hukum		Materi: 1. Perbandingan politik hukum Pustaka:	10%
13	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum melalui pendekatan budaya	Dapat menganalisis politik hukum melalui pendekatan budaya	Kriteria: Ketepatan menganalisis politik hukum melalui pendekatan budaya Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: 1. Politik hukum melalui pendekatan budaya Pustaka:	5%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi keterkaitan antara politik hukum dan otonomi daerah	Dapat mengevaluasi keterkaitan antara politik hukum dan otonomi daerah	Kriteria: Ketepatan dalam mengevaluasi keterkaitan antara politik hukum dan otonomi daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : review materi		Materi: 1. Keterkaitan antara politik hukum dan otonomi daerah Pustaka:	5%

15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan	Dapat merumuskan inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan	Kriteria: Ketepatan merumuskan inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Menulis artikel tentang inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan		Materi: 1. Inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan Pustaka:	5%
16	UAS	Ujian Akhir Semester	Kriteria: 5 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Luring		Materi: Ujian Akhir Semester Pustaka: 1. <i>Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung.</i>	5%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	100%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Titap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2
Hukum



Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.
NIDN 0007088801

VALID